



SM/Eko Fataip

**BERDIALOG** : Sejumlah narasumber berdialog pada acara "Diskusi Media Pilkada Bebas SARA" yang diselenggarakan Institut Komunikasi Nasional (IKN), di kampus Unimus Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, kemarin. (27)

## Isu SARA Dinilai Makin Tak Terkontrol

**SEMARANG** - Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto PhD menilai, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) belakangan ini makin tidak terkontrol.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) ini melihat kondisi tersebut sangat kontras jika dibandingkan pada masa orde baru.

Menurutnya, konten berbau SARA sekarang ini seharusnya bisa dikontrol, karena ada payung hukum yang jelas. Faktanya, justru bertolak belakang dan cenderung tidak terkendali.

"Isu SARA sebetulnya bukan hal baru, justru diperkenalkan sebelum reformasi. Isu ini ketika orde baru dianggap sesuatu yang tidak boleh disentuh, dibicarakan, dan tabu. Namun, sekarang sudah menjadi wacana sehari-hari, bahkan terbuka," kata Yuwanto pada acara Diskusi Media Pilkada Bebas SARA, yang diselenggarakan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) di kampus tersebut, Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, kemarin.

Dia mengemukakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang efektif.

Sementara itu, Tim Satgas Nusantara Polri, Kombes Sulistyو menyoroti maraknya informasi bohong atau hoaks, terutama di media sosial. Media ini dianggap salah satu saluran yang berkontribusi

besar dalam penyebaran hoaks.

Media penyebar hoaks berikutnya adalah aplikasi pesan instan, laman, dan email. Adapun bentuk hoaks yang paling sering memiliki dampak dan pengaruh, yakni tulisan 62,1 persen, gambar 37,5 persen, video 0,4 persen.

### Paling Bebas

"Pers kita paling bebas dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Inggris. Perkembangan teknologi menuntut media konvensional beralih ke media daring. Diharapkan media mainstream ini mampu menekan dan melawan berita hoaks," paparnya.

Menanggapi hal itu, Pemimpin Redaksi Suara-Merdeka.com, Setiawan Hendra Kelana menyatakan, saat ini ada sekitar 43.000 media daring di Indonesia.

Namun, diakui tidak seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perusahaan, sumber daya manusia, maupun konten.

Dia menyebut, berdasarkan Dewan Pers, media yang sudah terverifikasi secara faktual maupun administrasi, jumlahnya tidak lebih dari 500. Angka itu dianggap masih kecil jika dibandingkan dengan yang belum terverifikasi.

"Ini tantangan bagaimana media bisa menjadi profesional, terlebih informasi di media sosial cenderung masif. Terkait isu SARA terutama di Jateng, saya meyakini bisa ditekan sedemikian rupa," imbuhnya. (ftp-27)